

Analysis of the Implementation of the MSME Acceleration Policy through the PKT Jospol Program in East Kalimantan Province

Analisis Implementasi Kebijakan Akselerasi UMKM melalui Program PKT Jospol di Provinsi Kalimantan Timur

Dariska Nur Laila Sifa ^{1*}, Iman Surya ²

¹²Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Corresponding Author: dariskanurlaila123@gmail.com

Abstract: The economic transformation of East Kalimantan Province to become a buffer zone for the Indonesian Capital City (IKN) demands the readiness of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. The East Kalimantan Government, through the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs (DPPKUKM), responded to this through the Integrated Entrepreneurship Development Program (PKT) Jospol to accelerate the upgrading of MSMEs. This study analyzes the implementation of this policy using George C. Edward III's theory, which includes communication, resources, character/attitude, and bureaucratic structure. This research method is descriptive qualitative, with triangulation of primary data from interviews with government officials and the results of questionnaires from program participants. The results show that the policy communication went very well and was clearly understood by the targets. The implementer's disposition was also very responsive, which had a direct impact on increasing the variety of production and turnover of participants. However, this implementation faced obstacles in resource variables, such as a registration server that experienced errors and the quality of equipment materials (such as ovens) that were less than optimal for some participants even though the equipment was still usable and had a warranty guarantee. It is necessary to increase the capacity of the registration server to anticipate the surge in participants and evaluate the procurement of goods as well as involve village officials to expand the reach of the program in the future.

Keywords: Policy Implementation; MSMEs; PKT Jospol; Edward III; East Kalimantan

Abstract: Transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kesiapan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) merespons hal ini melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jospol guna mengakselerasi UMKM Naik Kelas. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, watak/sikap, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan triangulasi data primer dari wawancara aparatur dinas dan hasil kuisioner peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berjalan sangat baik dan dipahami sasaran secara jelas. Disposisi implementor juga sangat responsif, yang berdampak langsung pada peningkatan ragam produksi dan omzet peserta. Namun, implementasi ini menghadapi kendala pada variabel sumber daya, seperti server pendaftaran yang sempat mengalami eror dan kualitas material alat (seperti oven) yang kurang optimal pada sebagian peserta meskipun alat tersebut tetap dapat dimanfaatkan dan adanya jaminan garansi. Diperlukan peningkatan kapasitas server pendaftaran untuk mengantisipasi lonjakan peserta dan evaluasi pengadaan barang serta pelibatan aparatur kelurahan untuk memperluas jangkauan program di masa depan.

Keywords: Implementasi Kebijakan; UMKM; PKT Jospol; Edward III; Kalimantan Timur

History Article: Submitted 10 June 2026 | Revised 22 June 2026 | Accepted 26 June 2026

How to Cite: (Sifa & Surya, 2026). Sifa, D. N. L., & Surya, I. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Akselerasi UMKM melalui Program PKT Jospol di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 14(1), 101–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v14i1.30138>

Pendahuluan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara historis memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor sumber daya alam. Berdasarkan berita resmi statistik nomor 13/02/64/Th.XXIX, oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 Februari 2026 tentang Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,53%,

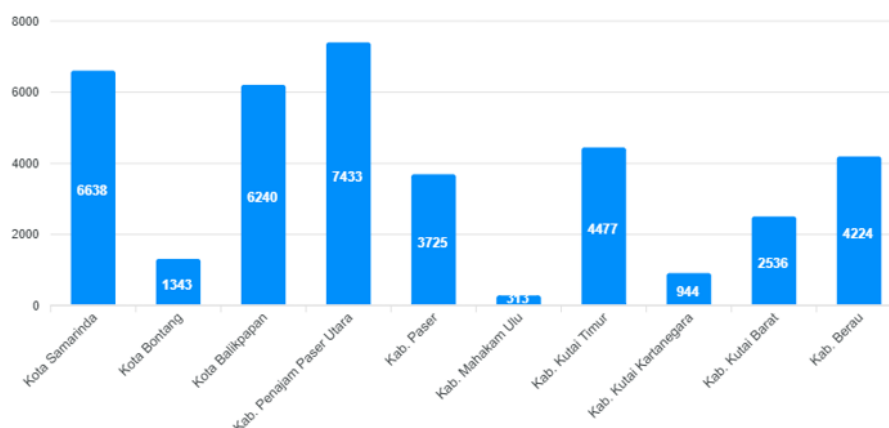


© the Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

sektor yang berkontribusi besar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 34,18% terhadap struktur ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2026). Sehingga untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus melakukan diversifikasi dengan melakukan penguatan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terlebih lagi, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) mewajibkan masyarakat Kalimantan Timur untuk meningkatkan kapasitas agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan peluang ekonomi baru, bukan sekadar menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Pada pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM bertujuan untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 2008). Hal ini menunjukkan adanya peran strategis pembangunan daerah dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur, jumlah UMKM yang terdaftar pada awal tahun 2025 mencapai 75.000 unit, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor makanan dan minuman, fashion, serta kerajinan tangan menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan tersebut (DigiUMKM, 2025). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam mengelola sektor industri, perdagangan, dan koperasi di daerah Kalimantan Timur termasuk dalam perumusan kebijakan mulai dari perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM di Kalimantan Timur (Hariati et al., 2018).



(Sumber: <https://digiukm.kaltimprov.go.id/infografi/ukm>)

Gambar 1. Data Jumlah UMKM Per Lokasi di Kalimantan Timur

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang cukup krusial terhadap siklus kebijakan di mana berperan menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Situmorang dalam (Mansur, 2021), Implementasi dimaknai sebagai satu dari tahapan atau variabel terpenting dari kebijakan publik yang berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik. Implementasi kebijakan dipandang sebagai fenomena yang bersifat kompleks pada sebuah proses atau hasil dari sebuah kebijakan dan ditempatkan sebagai alat administrasi hukum (Mansur, 2021). Kebijakan publik dapat terwujud melalui beberapa tahapan, pertama kebijakan harus dirumuskan kemudian dilaksanakan dan dievaluasi mulai dari perumusan maupun pelaksanaannya. Suatu kebijakan meskipun dianggap sebaik dan sehebat apapun dirumuskan namun apabila tidak diimplementasikan maka hanyalah sekadar macan kertas. Maka implementasi dari sebuah kebijakan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang dirasakan oleh masyarakat atau sasaran kebijakan (Sutmasa, 2021).

Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh dinamika sosial, politik, dan administratif yang menyertai proses pelaksanaannya.

Tahap implementasi di dalam siklus kebijakan publik memegang peranan penting dan di dalam prosesnya implementasi kebijakan tersebut bisa sangat kompleks yang akan membuat suatu kebijakan dapat berbeda dengan kebijakan lain (Edwards, 1980). Menurut Edward III dalam (Rodiyah et al., 2022), dalam teori implementasi kebijakan terdapat empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel tersebut dijalankan secara berkesinambungan atau saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lainnya di dalam penentuan implementasi kebijakan akan berhasil atau mengalami kegagalan (Rodiyah et al., 2022).

Pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM perlu meningkatkan perannya secara aktif kepada pengusaha besar dan pengusaha kecil untuk mengembangkan kemitraan usaha dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Efdison & Hendra, 2020). Keberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai unsur dasar untuk pengembangan diri dan mencapai kemajuan untuk memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan (Andiny & Nurjannah, 2018). UMKM sebagai objek yang diberdayakan, pemberdayaan dimaksudkan agar para pelaku UMKM mendapatkan motivasi berupa kesadaran dan kemampuan untuk menentukan dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi (Suryani et al., 2018). Kondisi UMKM di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada beberapa masalah mulai dari terbatasnya kapasitas pelaku usaha dalam aspek manajemen, akses permodalan, pengemasan produk, hingga literasi teknologi digital. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui DPPKUKM Kalimantan Timur meluncurkan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jospol. Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja dengan mendampingi wirausaha secara komprehensif, mulai dari pelatihan, pemberian alat, hingga legalitas. Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangannya, namun juga sangat bergantung pada tahap implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi program PKT Jospol dengan mengukur kesiapan aparatur birokrasi sebagai agen pelaksana sekaligus membandingkannya dengan respons dan kepuasan pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) JOSPOL dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Kalimantan Timur. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) JOSPOL dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Fokus tersebut diarahkan pada aspek-aspek implementasi kebijakan publik dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III (1980) yang menetapkan empat variabel penentu keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan PKT Jospol dan Pelaku UMKM penerima manfaat Program PKT JOSPOL. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif aktor kebijakan, sehingga dapat menggambarkan dinamika implementasi kebijakan secara utuh (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2023).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua pendekatan untuk mencapai triangulasi data. Pertama, wawancara mendalam dengan informan birokrasi, yaitu Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama di DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, penyebaran kuisioner tertulis kepada perwakilan pelaku UMKM peserta program PKT Jospol sebanyak dua orang. Meskipun secara kuantitas terbatas, pemilihan kedua informan ini dirancang untuk memberikan representasi spasial dan karakteristik wilayah yang valid di Provinsi Kalimantan Timur yaitu satu orang berasal dari Kota Balikpapan dan satu informan lainnya berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam menjaga keabsahan dan objektivitas hasil, data dari instrumen tertulis pelaku UMKM ini di triangulasi secara silang dengan data primer yang diperoleh melalui

komunikasi langsung, koordinasi, dan permintaan informasi administratif kepada aparaturnya Dinas PPUKM selaku pelaksana dan pengelola program. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup kondensasi data dari wawancara dan kuisioner, penyajian naratif, serta penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Kebijakan yang Efektif

Jospol (Jaring Optimalisasi Sosial dan Pelayanan) merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 2025-2030 yang mencakup banyak bidang mulai dari 1) hilirisasi industri pertanian berbasis pertanian modern, 2) pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik, 3) peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah, 4) mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital, 5) mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa, 6) membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, 7) revitalisasi sungai mahakam, 8) memudahkan investasi dan kerjasama antara pemda, pusat, dan swasta, 9) serta pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur (Superadmin, 2025). Sedangkan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jospol di Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kalimantan Timur yang termasuk dalam bidang ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendorong dan mendukung UMKM di Kalimantan Timur. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) merupakan bentuk solusi konkrit oleh pemerintah yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, akademisi, dan masyarakat lainnya untuk mengembangkan potensi dan kemandirian para pelaku usaha dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan para wirausaha baru, sehingga dapat pula mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur khususnya terhadap wilayah yang menjadi objek dari pelaksanaan program tersebut.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu menyebutkan terdapat enam tujuan dari Program PKT Jospol ini yaitu 1) meningkatkan kesempatan berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru; 2) meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah; 3) meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal; 4) mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi dan UMKM; 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi; dan 6) mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (*Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu*, 2025).

Strategi komunikasi program PKT Jospol dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang oleh DPPKUM agar informasi dalam hal ini tata cara pendaftaran program PKT Jospol dapat diterima secara luas oleh pelaku UMKM di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Salah satu bentuk berkoordinasi yaitu dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga komunitas UMKM. Selain itu, sosialisasi digencarkan secara digital melalui media sosial resmi seperti website pemerintah, instagram dan grup WhatsApp komunitas maupun publikasi melalui media massa. Efektivitas strategi ini dikonfirmasi langsung oleh kelompok sasaran yaitu pelaku UMKM atau peserta program PKT Jospol menyatakan pertama kali mengetahui program ini melalui WhatsApp Grup Komunitas dan Instagram resmi DPPKUM. Para peserta juga menilai bahwa informasi mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran yang disampaikan oleh dinas sangat jelas dan mudah dipahami.

Hambatan pada Sumberdaya dan Fasilitas Bantuan

Pada tahun 2025 program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu telah dilaksanakan di tiga kota/kabupaten di wilayah Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total peserta 1000 pelaku usaha yang terbagi menjadi tiga

kluster yaitu pencari kerja, wirausaha pemula, dan wirausaha naik kelas. Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jospol selain memberikan pelatihan juga memberikan pendampingan selama 3 bulan dan pemberian atau fasilitasi bantuan alat kepada pelaku UMKM. Terdapat delapan pelatihan yaitu pelatihan kuliner, menjahit, laundry, barista, digital printing, hair & beauty, perbengkelan, dan service ac dengan bantuan alat menyesuaikan pelatihan yang diikuti oleh peserta PKT Jospol. Bentuk pendampingan diberikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha peserta agar lebih berkembang dan mandiri.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur sebagai entitas pemerintahan memiliki kedudukan sebagai penggerak dalam hal fasilitator, regulator, dan katalisator. Dalam hal fasilitator, pemerintah berperan menyediakan sarana dan prasarana yang sulit dijangkau secara mandiri oleh pelaku usaha seperti infrastruktur pemasaran digital dan fasilitasi sertifikasi halal dan BPOM. Sedangkan regulator, pemerintah berperan dalam menyusun aturan main yang berpihak pada ekonomi kerakyatan termasuk alokasi belanja pemerintah untuk produk lokal dan perlindungan terhadap usaha mikro. Serta katalisator yaitu pemerintah berperan mempercepat proses transformasi pelaku usaha dari skala pemula menjadi lebih mapan melalui program maupun proyek.



(Sumber: DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 2. Sasaran Peserta PKT Jospol Tahun 2025

Sasaran peserta PKT Jospol Kalimantan Timur terbagi menjadi tiga kluster yaitu Pencari Kerja, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Naik Kelas dengan total peserta sebanyak 1000 orang yang terbagi di tiga kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda sebanyak 362 Peserta dengan rincian pencari kerja sebanyak 21 orang, wirausaha pemula sebanyak 270 orang, dan wirausaha naik kelas sebanyak 71 orang. Berbeda dengan Kota Balikpapan dengan total peserta 257 dengan rincian pencari kerja sebanyak 10 orang, wirausaha pemula sebanyak 149 orang, dan wirausaha naik kelas sebanyak 98 orang. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah peserta terbanyak dibanding dua kota lainnya yaitu sebanyak 381 peserta dengan rincian pencari kerja sebanyak 37 orang, wirausaha pemula sebanyak 287 orang, dan wirausaha naik kelas sebanyak 57 orang. Pelatihan dilakukan sama yaitu selama empat hari untuk pelatihan Kuliner dan Menjahit, sedangkan enam pelatihan lainnya selama dua hari (DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur).

Pada variabel sumber daya manusia, berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Myra Eka Putri Tarigan selaku Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama menyatakan bahwa Bidang Koperasi dan UKM telah didukung oleh 23 orang pegawai struktural dan fungsional yang dinilai cukup memadai. Namun, program ini menghadapi hambatan pada sumber daya teknis dan anggaran. Tingginya trafik antusiasme pendaftar UMKM menyebabkan server pendaftaran menjadi lambat dan error, yang diperparah oleh keterbatasan literasi digital sebagian peserta. Selain infrastruktur IT, kualitas sumber daya material berupa alat bantuan juga mendapat catatan kritis dari kelompok sasaran. Para peserta telah menerima bantuan spesifik seperti oven, kompor

mata seribu, chopper, blender, dan wajan. Namun, terdapat keluhan terkait kualitas spesifikasi material alat salah satu peserta melaporkan menerima oven dengan kondisi yang kurang baik (material mudah meleyot dan pengaturan api yang sangat kecil), meskipun alat tersebut masih dapat diperbaiki dan digunakan. Hal ini mendapat respon dari pihak pelaksana yaitu apabila terdapat kerusakan pada alat yang dibagikan peserta dapat mengajukan garansi perbaikan pada alat tersebut.

Disposisi dan Dampak Nyata Pendampingan

DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jospol mulai dari mengadakan pendaftaran dan seleksi, memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM mulai dari pelatihan, bantuan peralatan usaha, legalitas usaha, hingga akses pemasaran dan pengembangan jejering usaha, selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan, pendampingan langsung, maupun pelaporan perkembangan usaha dari peserta. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dan penyusunan kebijakan program selanjutnya agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, program ini tidak hanya bersifat bantuan sesaat, namun diarahkan untuk menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, DPPKUKM juga melakukan kegiatan lanjutan fasilitasi peserta program PKT Jospol yaitu mengadakan kegiatan literasi digital dan kegiatan bimbingan teknis potensial UKM ekspor.

Komitmen tinggi (disposisi) ditunjukkan oleh petugas DPPKUKM selama program berlangsung. Seluruh responden menilai bahwa petugas dan pendamping bersikap sangat responsif dan membantu. Bentuk pendampingan diberikan selama 3 bulan mencakup berbagai sektor (seperti kuliner, menjahit, laundry dan lainnya). Para peserta mendapatkan pelatihan kualitas produk, legalitas (NIB dan Halal), manajemen keuangan, hingga digital marketing. Responsivitas birokrasi ini berbuah pada capaian nyata (outcomes), peserta menyatakan materi sangat sesuai dengan kebutuhan dan berdampak positif pada peningkatan produksi serta perluasan jangkauan pasar. Berkat bantuan oven gas dari PKT Jospol, pelaku usaha yang awalnya hanya menggunakan oven tangkring kecil untuk membuat kue kering kini mampu mengembangkan usahanya dengan memproduksi varian roti dan bolu.

Selain itu, sikap komitmen tinggi oleh petugas DPPKUKM juga terlihat pada saat proses pendaftaran. Petugas DPPKUKM secara aktif memposting informasi pendaftaran mulai dari tata cara, persyaratan, dan jadwal hingga pengumuman di sosial media resmi DPPKUKM juga aktif membantu peserta yang mengalami kendala dalam pengunggahan dokumen khususnya bagi pelaku UMKM di daerah tertentu dengan membuka layanan pendampingan dan helpdesk, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak teknis agar proses pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini membuktikan adanya komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah dalam mengimplementasikan suatu program.

Struktur Birokrasi dan Pelibatan Akar Rumpuk

Tahapan pasca-program menunjukkan adanya SOP yang terstruktur. Setelah pendistribusian alat, birokrasi tidak lepas tangan, melainkan melakukan monitoring lapangan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan omzet dan masalah pelaku usaha. Selain itu, DPPKUKM memfasilitasi business matching untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli, distributor, perbankan, dan marketplace. Namun, untuk menyempurnakan struktur sosialisasi ke depannya, kelompok sasaran menyarankan agar pendaftaran PKT Jospol melibatkan aparat kelurahan secara lebih proaktif agar distribusi bantuan dapat merata dan diketahui oleh pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses informasi digital. Berikut beberapa kegiatan lanjutan fasilitasi peserta PKT Jospol Kalimantan Timur yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur:

Kegiatan lanjutan yang dilakukan untuk memfasilitasi para peserta PKT Jospol belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh karena hanya tertuju pada beberapa kelompok sasaran peserta saja dan terlihat pada Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilakukan kegiatan lanjutan setelah penyerahan alat bantuan yang juga merupakan tahapan dari program tersebut. Hal ini mendapat respon dari pihak pelaksana program yaitu Dinas DPPKUKM menyatakan bahwa salah

satu kendala yang cukup dirasakan pada saat pelaksanaan program yaitu adanya keterbatasan kapasitas anggaran dibandingkan dengan tingginya antusiasme dan jumlah pelaku UMKM yang menjadi peserta. Sehingga diperlukan penyesuaian kuota penerima bantuan dengan kemampuan fiskal daerah agar program tetap berjalan dengan lancar dan seluruh tahapan pelaksanaan program dapat dirasakan oleh seluruh peserta.

Tabel 1. Kegiatan Lanjutan Fasilitasi Peserta PKT Jospol di Tahun 2026

No	Kegiatan
1	Kegiatan Literasi Digital 40 Peserta pada tanggal 13 April 2026 di Galeri UMKM Samarinda
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Potensial UKM Ekspor 50 Peserta Samarinda pada tanggal 21 April 2026 di Lantai IV DPPKUMK Provinsi Kalimantan Timur
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Potensial UKM Ekspor 50 Peserta Balikpapan pada tanggal 22 April 2026 di Galeri UMKM Balikpapan

Sumber: DPPKUMK Provinsi Kalimantan Timur

Kesimpulan

Implementasi kebijakan akselerasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas di Provinsi Kalimantan Timur diwujudkan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jospol oleh pemerintah setempat. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUMK) bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III dimana terdapat empat variabel utama yang dianalisis, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan bagi UMKM. Hal ini penting untuk memastikan UMKM lokal tidak hanya menjadi penonton dalam transformasi ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan PKT Jospol berjalan sangat efektif dan inklusif. Informasi pendaftaran tersampaikan dengan jelas melalui media sosial dan grup komunitas yang mudah diakses warga. Sikap atau disposisi aparatur pelaksana juga dinilai sangat responsif dalam memberikan pendampingan teknis. Pelaku UMKM merasakan dampak langsung berupa peningkatan omzet dan perluasan ragam varian produk mereka. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala signifikan pada variabel sumber daya. Lonjakan antusiasme pendaftar sempat menyebabkan gangguan pada server pendaftaran program. Keterbatasan literasi digital dari sebagian peserta juga menjadi hambatan administratif di lapangan. Selain itu, terdapat keluhan terkait kualitas material bantuan, seperti oven yang penyok, dinilai kurang optimal oleh beberapa peserta sasaran. Meskipun demikian, alat bantu tersebut pada akhirnya tetap dapat dimanfaatkan untuk operasional produksi UMKM dan pihak penyedia juga memberikan garansi apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut.

Secara keseluruhan, program PKT Jospol berhasil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Struktur birokrasi telah berjalan baik melalui adanya pemantauan berkala dan fasilitasi jejaring bisnis lanjutan. Namun, perbaikan sistem pengadaan barang sangat diperlukan agar kualitas bantuan sesuai standar produksi UMKM. Evaluasi terhadap pihak ketiga penyedia alat bantu harus diperketat untuk mencegah penurunan spesifikasi barang. Pemerintah daerah juga perlu segera meningkatkan kapasitas server pendaftaran untuk mengantisipasi lonjakan peserta. Pelibatan aparatur di tingkat kelurahan harus ditingkatkan agar program ini menjangkau masyarakat lebih luas. Aparatur kelurahan dapat membantu menyaring data pelaku usaha kecil yang belum memiliki akses informasi digital. Langkah strategis ini akan memastikan pemerataan distribusi bantuan dan pendampingan di seluruh kawasan daerah. Dengan evaluasi yang komprehensif, ekosistem ekonomi Kalimantan Timur akan menjadi tangguh dan

berkeadilan. Akselerasi UMKM yang inklusif ini menjadi kunci utama kesiapan daerah penyangga menyambut kehadiran IKN.

Daftar Pustaka

- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kota langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 31–37.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,53 persen*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- DigiUMKM. (2025). *UMKM di Kalimantan Timur Semakin Berkembang Berkat Dukungan Digitalisasi dan Program Pemerintah*. DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur.
- Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. *Exas A&M University: Congressional Quarterly Press*.
- Efdison, Z., & Hendra, H. (2020). Pemetaan Geografi Industri Kecil Di Kabupaten Kerinci Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengembangan Umkm Yang Inovatif Dan Berdaya Saing. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(3), 475–487. <https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.317>
- Hariati, Ikhsan, & Nur, D. S. (2018). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(2), 84–93.
- Mansur, J. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. VI(II)*, 324–334.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2023). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. *Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science*, 109–118.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (pp. 1–12). (2025).
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebiajakn Publik*. 237.
- Sifa, D. N. L., & Surya, I. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Akselerasi UMKM melalui Program PKT Jospol di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 14(1), 101–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v14i1.30138>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Superadmin. (2025). *Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2025-2030: Gratispol dan Jospol*. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- Suryani, S., Suyadi, & Syahdanur. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). 1.